

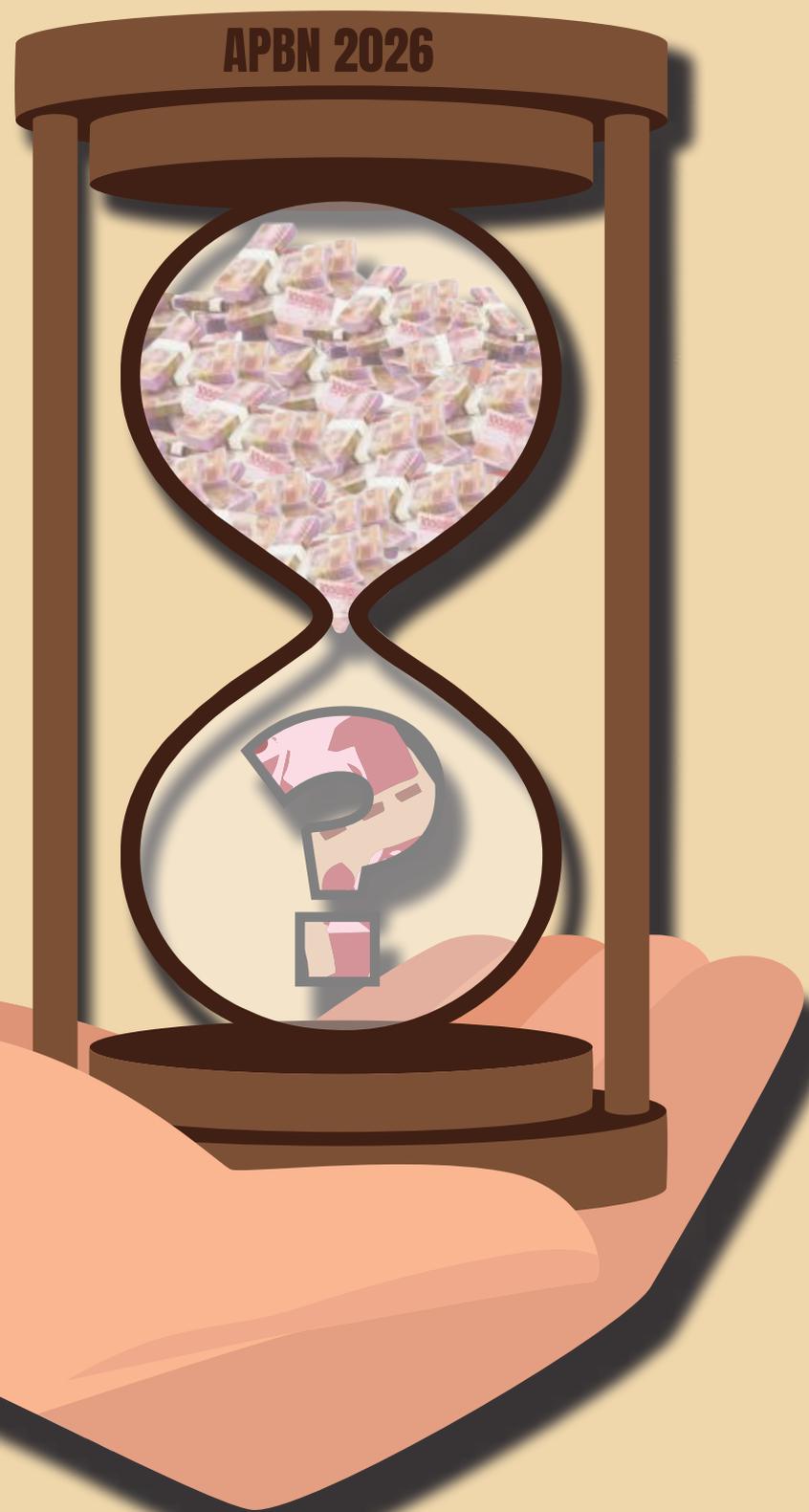
# EFISIENSI ANGGARAN LANJUT KE 2026, TEPATKAH?

**P**emerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Langkah ini sejalan dengan penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mengatur mekanisme efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD), berlaku mulai 5 Agustus 2025. Sri Mulyani menyatakan, pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran memerlukan langkah-langkah pengendalian belanja negara dalam APBN dengan tetap mengacu pada prioritas penganggaran sesuai arahan Presiden. Pasal 2 PMK tersebut menyebutkan efisiensi anggaran diterapkan pada belanja K/L dan TKD. Hasil efisiensi diutamakan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, sebagai upaya penataan belanja negara agar dana mengalir ke sektor yang memberi dampak ekonomi lebih besar. Kebijakan ini juga diarahkan pada sektor produktif untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pertanyaannya, tepatkah langkah efisiensi ini diterapkan pada 2026?

BACA HAL 11...

## SEBANYAK 15 ITEM YANG BISA DIEFISIENSIKAN:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| a. alat tulis kantor;                      | : | i. sewa gedung, kendaraan, dan peralatan; |
| b. kegiatan seremonial;                    | : | j. jasa konsultan;                        |
| c. rapat, seminar, dan sejenisnya;         | : | k. bantuan pemerintah;                    |
| d. kajian dan analisis;                    | : | l. pemeliharaan dan perawatan;            |
| e. diklat dan bimtek;                      | : | m. perjalanan dinas;                      |
| f. honor output kegiatan dan jasa profesi; | : | n. peralatan dan mesin; dan               |
| g. percetakan dan souvenir;                | : | o. infrastruktur.                         |
| h. lisensi aplikasi;                       | : |   |





# PRESIDEN PRABOWO RESMIKAN 162 SATUAN BARU DI TNI

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung defile pasukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Landasan Suparlan, Komplek Pendidikan dan Pelatihan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Minggu (10/8/2025). Foto: BPMI Setpres

**Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan 162 satuan baru di lingkungan TNI dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Peresmian satuan baru itu merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI.**

**D**alam kesempatan itu, Presiden juga melantik dan mengukuhkan pimpinan satuan baru tersebut. Bukan hanya itu, Presiden juga melantik Jenderal Tandyo Budi sebagai Wakil Panglima TNI, posisi yang sudah 25 tahun kosong.

Penambahan satuan, dari Komando Daerah Militer hingga Batalyon Teritorial Pembangunan, disebut dibutuhkan demi mewujudkan pertahanan yang sangat kuat.

Satuan baru yang diresmikan Presiden terdiri dari 6 komando daerah militer (Kodam), 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, dan 6 grup komando pasukan khusus. Selain itu, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, serta 100 batalyon teritorial pembangunan. Ada pula 5 batalyon infanteri marinir serta 5 batalyon komando korps pasukan gerak cepat.

"Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Karena itu, tidak ada

pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah, hari ini saya melantik enam panglima kodam baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 batalyon teritorial pembangunan baru," kata Presiden Prabowo.

Presiden juga mengatakan bahwa panglima-panglima, komandan-komandan yang dilantik adalah orang-orang yang dipilih. Karena itu, Prabowo meminta pada mereka untuk memimpin dari depan. "Panglima TNI, Panglima Pasukan TNI, Komandan Komandan Brigade, Komandan Komandan Batalyon memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis," katanya.

Dia menandakan bahwa tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin harus memimpin dari depan. Pemimpin harus memberi contoh. Pemimpin adalah prajurit yang paling baik.

"Saya titip, Saudara-saudara

sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri.

Pimpin dengan baik. Jaga mereka dengan baik. Latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman," pesannya.

Prabowo juga menekankan bahwa TNI adalah tentara rakyat yang lahir dari rakyat, serta anak kandung rakyat. Untuk itu, tugas dari TNI adalah mengabdikan, membela, dan kita siap mati untuk rakyat.

"Hari ini, di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia. Karena itu, wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensive," katanya.

Prabowo meminta supaya mempertahankan setiap jengkal bangsa Indonesia, Mulai dari



**Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah, hari ini saya melantik enam panglima kodam baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 batalyon teritorial pembangunan baru,"**

**PRABOWO  
SUBIANTO**  
Presiden RI

kampung, dukuh, lembah, bukit, gunung, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. "Seluruh bangsa Indonesia kita pertahankan, Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita, tidak masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, Saudara-saudara sekalian," kata Prabowo penuh semangat.

Sementara itu, para pejabat TNI yang dilantik Prabowo di Batujajar yaitu Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI; Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus), jabatan sebelumnya adalah Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD; Letjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar), sebelumnya menjabat Komandan Marinir (Dankormar); Marsekal Madya (Marsdya) Deny Muis sebagai Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat), sebelumnya menjabat Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat); Marsdya Andyawan Martono Putra sebagai Pangkohanudnas.

Kemudian, ada 6 Pangdam Baru yaitu Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo sebagai panglima Kodam XIX/Tuanku Tambusai - meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau; Mayjen TNI Arief Gajah Mada sebagai panglima Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol - meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi; Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai panglima Kodam XXI/Radin Inten - meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu; Mayjen TNI Zainul Arifin sebagai panglima Kodam XXII/Tambun Bungai - meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan; Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar sebagai panglima Kodam XXIII/Palaka Wira - meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat; dan Mayjen TNI Lucky Avianto sebagai panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora - berpusat di Merauke, Papua Selatan.

Kemudian ada juga 3 Kepala Badan, yaitu Kepala Badan Logistik Pertahanan Marsekal Madya Jauhari lulusan Akabri 1990; Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Laksamana Madya TNI Suko Dwi Antara lulusan Akabri 1992; dan Kepala Badan Cadangan Nasional Letjen TNI Gabriel Lema lulusan Akmil 1990.

Di satu sisi, penambahan satuan baru di tubuh TNI ini mendapat kritik karena dinilai TNI tidak sejalan dengan semangat reformasi dan UU TNI. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI disebutkan, organisasi dan gelar kekuatan TNI tidak boleh menduplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil. Hal itu seperti yang dilontarkan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf dilansir Kompas, Minggu (10/8/2025). (rls,ist/lut)

# KOMISI VIII DPR RI PERTANYAKAN RIBUAN KARYAWAN BUMN TERIMA BANSOS



Anggota DPR Maman Imanul Haq saat diskusi di DPR.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap sekitar 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam analisis selama enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos. Hasilnya, selain sekitar 28 ribu pegawai BUMN, terdapat 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga menerima bantuan tersebut.

"Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak. Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang," ujar Kiai Maman, sapaan akrabnya, di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Menurut Kiai Maman, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu. "Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan," ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR ini menilai, keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos. DTSEN

merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN dan Kemenko Perekonomian.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut di salah satu bank saja terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, kemudian ada 7.479 orang berprofesi sebagai dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja di level eksekutif atau manajerial.

"Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial," ujar Ivan di Kemensos pada Kamis (7/8/2025) lalu.

Di mana menandakan terkait dengan temuan data tersebut maka sebaiknya segera diverifikasi langsung oleh Kemensos untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. "Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali," tegasnya.

Dari total 10 juta rekening yang diberikan Kemensos kepada PPATK

untuk ditelusuri, hanya 8.398.624 rekening yang teridentifikasi menerima bansos. Sisanya, sekitar 1,7 juta rekening, tidak ditemukan bukti sebagai penerima bantuan.

Tak hanya itu, PPATK juga mendapati lebih dari 78.000 penerima bansos masih aktif bermain judi online pada semester I 2025. Bahkan, hampir 60 orang penerima memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta, namun tetap menerima bansos.

"Ini jelas menjadi perhatian. Bahkan, kami temukan hampir 60

orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta, namun masih menerima bantuan," kata Ivan.

Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan saat ini Kementerian Sosial masih mendalami profil pekerjaan dan latar belakang ekonomi para penerima, mengingat dalam data itu ditemukan pula sejumlah penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.

"Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Dan kondisinya bila tidak sesuai, akan kami

coret," ujarnya.

Soal Bansos yang tidak tepat sasaran, kata Syaifullah, memang menjadi sorotan, sebagai bentuk koreksi, presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator

pemutakhiran data bansos nasional.

"Dengan inpres ini, kita sedang konsolidasi, data bansos terus kami mutakhirkan. Salah satu caranya adalah memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka," ucap Syaifullah.

Gus Ipul juga mengatakan Kemensos akan mendalami dan koordinasi dengan Kementerian BUMN. "Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalam," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, data yang disampaikan PPATK merupakan hasil analisis transaksi perbankan semester pertama 2025. Sejumlah penerima bansos mengaku sebagai pegawai BUMN ketika membuka rekening di bank.

"Jadi tadinya, untuk yang BUMN dan profesi-profesi lain yang disinggung oleh Ketua PPATK tadi itu adalah pengakuan mereka ketika membuka rekening di perbankan," jelas Gus Ipul.

Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. "Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN)," katanya.

Sedangkan, terkait laporan adanya 35 anggota DPR di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah, Syaifullah mengaku hal ini baru terdeteksi karena proses konsolidasi data bersama PPATK baru berjalan sejak Februari 2025. Namun, dia memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut.

"Kita baru mulai konsolidasi sejak Inpres itu keluar. Kami proaktif, tidak hanya dengan PPATK tapi juga pemerintah daerah dan bank penyalur. Kalau masyarakat ingin menyanggah atau mengusulkan nama penerima, bisa melalui aplikasi Cek Bansos," katanya.

Syaifullah mengajak masyarakat termasuk media massa untuk ikut mengawasi serta melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos. Namun dia juga mengharapkan setiap pelaporan yang masuk bisa dilengkapi dengan data dan bukti, agar bisa



**Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak. Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang,"**

**MAMAN  
IMANUL HAQ**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

# KAMPUS RAMAI-RAMAI TARIK MAHASISWA KKN DI LUMAJANG BUNTUT TEROR CURANMOR

Sekitar seribu mahasiswa KKN di Lumajang pulang lebih awal akibat adanya teror pencurian sepeda motor (curanmor). Sebanyak 4 sepeda motor raib. Walhasil, 8 kampus sepakat menghentikan kegiatan.



Polisi memasang police line di Balai Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terkait kasus curanmor mahasiswa KKN. ist

**L**embaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Jember menarik seluruh mahasiswanya yang ikut dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif 2025 di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur akibat maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Diketahui saat ini Adaro sahamnya di KKN Kolaboratif itu diikuti perguruan tinggi negeri dan swasta. Kedelapan kampus tersebut adalah Universitas Jember, Universitas Lumajang, Universitas Islam Negeri KH Achmad Shidiq Jember, Universitas Islam Jember, STKIP PGRI Lumajang, Lalu, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan, Universitas PGRI Argopuro Jember, dan Politeknik Kesehatan Jember.

"Kebijakan itu diambil setelah terjadinya pencurian kendaraan bermotor milik mahasiswa peserta KKN Kolaboratif 2025 sebanyak dua kali dan kemarin Jumat (8/8) ada motor warga yang hilang di dekat posko KKN," kata Sekretaris LP2M Unej bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Ali Badrudin di Jember, dikutip dari Antara, Minggu (10/8/2025).

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk memberikan rasa aman dan bentuk perlindungan kepada mahasiswa yang mengikuti KKN Kolaboratif di sana.

"Kami sudah menggelar rapat secara daring dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Lumajang dan PIC dari kampus pengirim KKN Kolaboratif bahwa hasil keputusan bersama menarik seluruh mahasiswa KKN di Lumajang hari ini," tuturnya.

Ia mengatakan ada tiga kejadian dengan modus yang hampir mirip atau sama, sehingga kejadian itu dinilai bukan kebetulan. Sebab, hilangnya motor mahasiswa bukan karena faktor kelalaian dan hilang di tempat aman.

"Ini adalah momentum bersama melakukan perbaikan dalam hal kondusivitas keamanan di Lumajang, bukan berarti kami menilai Lumajang tidak baik-baik saja, tetapi diharapkan

dari pemkab dan aparat kepolisian di Lumajang bergerak ke arah lebih baik," katanya.

Dengan demikian, dalam rapat tersebut disepakati semua PTN dan PTS menarik mahasiswanya di 105 desa dengan total mahasiswa sebanyak 1.328 orang.

"Para mahasiswa memulai KKN Kolaboratif tanggal 15 Juli 2025 dan seharusnya baru berakhir pada 20 Agustus 2025, namun dengan kejadian banyaknya curanmor, maka ditarik. Penarikan itu hanya untuk lokasi Lumajang, sementara di kota lain tetap berjalan sesuai jadwal,"

katanya.

Kejadian pertama curanmor terhadap mahasiswa peserta KKN Kolaboratif 2025 terjadi di Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Ada dua sepeda motor yang dicuri, yang satu milik mahasiswa FISIP Unej dan satu lagi milik mahasiswi UIN KHAS Jember.

Kemudian, kejadian kedua menimpa mahasiswa Unej yang melaksanakan KKN Kolaboratif di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh.

Kejadian ketiga di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh. Sebuah sepeda

motor warga hilang di dekat posko KKN.

Terpisah, Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Universitas Lumajang, Eko Romadhon, mengungkapkan keputusan menarik mahasiswa diambil setelah rapat besar dengan para penanggung jawab (PIC) dari delapan kampus.

"Mulai hari Sabtu seluruh mahasiswa dari 8 perguruan tinggi Jember dan Lumajang menarik 1.328 mahasiswa KKN untuk kembali ke kampus masing-masing," kata Eko, Minggu (10/8/2025).

Kekhawatiran akan keselamatan menjadi alasan utama. Eko menegaskan, jika KKN tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan memunculkan dampak negatif lebih besar, terutama bagi keamanan mahasiswa.

"Untuk tahun depan masih kita pikirkan lagi apakah ditempatkan di Lumajang atau tempat yang lain," pungkas Eko.

Kantor desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur, dibobol maling. Empat motor milik mahasiswa yang tengah menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hilang. (wid,ant,kom,rls/dya)

## HMI Desak Polisi Tuntaskan Kasus, Dideadline 3x24 Jam



Mahasiswa KKN kolaboratif di Desa Padang, Lumajang saat mendengarkan arahan untuk menyelesaikan program KKN, Jumat (8/8/2025) buntut maraknya pencurian motor. (Ist)

**HIMPUNAN** Mahasiswa Islam (HMI) se-Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendesak Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan ini merupakan buntut dari kasus pencurian empat sepeda motor milik mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lumajang.

Tiga di antaranya milik mahasiswa Universitas Jember, dan satu milik mahasiswa dari

Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shidiq (UIN KHAS) Jember. Akibat kejadian ini, delapan perguruan tinggi peserta KKN kolaboratif menarik 1.328 mahasiswa mereka dari lokasi pengabdian, meski masa KKN belum selesai.

Ketua Umum HMI Komisariat Lumajang, Intan, menyebut bahwa Kapolres Lumajang telah gagal memberikan rasa aman bagi masyarakat dan peserta KKN di wilayah tersebut.

"HMI se-Kabupaten Lumajang mendesak Kapolres Lumajang untuk mundur dari jabatannya karena telah meresahkan dan gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat Lumajang," ujar Intan di Lumajang, Minggu (10/8/2025).

Menurut Intan, maraknya kasus pencurian sepeda motor menunjukkan lemahnya tindakan preventif dari aparat keamanan di Kabupaten Lumajang. "Kejadian pencurian yang berulang kali menunjukkan adanya masalah sistemik yang perlu ditangani secara serius," lanjutnya.

Intan menekankan bahwa meskipun para korban bukan warga Lumajang, mereka adalah mahasiswa yang tengah mengabdikan membangun peradaban di masyarakat. "Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat adalah aset berharga bagi pembangunan komunitas, dan mereka berhak merasa aman dalam menjalankan tugasnya," katanya.

HMI menuntut agar dalam waktu 3x24 jam, pihak kepolisian segera mengungkap pelaku pencurian. Jika tidak, HMI bersama elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi untuk menuntut Kapolres mundur dari jabatannya. (ant,rls,ist/dya)

# GADUH REKENING BANK WARGA BISA DIINTIP BI LEWAT PAYMENT ID

Bank Indonesia (BI) ingin menguji coba Payment ID, inovasi sistem pembayaran yang mencatat setiap transaksi, dengan format menggabungkan NIK dan kode ID. Sistem ini bisa mengintip data transaksi keuangan masyarakat. Rencananya akan diluncurkan dan diuji coba pada 17 Agustus mendatang.

**P**ayment ID bakal diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai inovasi baru dalam sistem pembayaran. Ini adalah sebuah sistem dengan kode unik yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembayaran, dengan format yang menggabungkan NIK dan kode ID.

Singkatnya, sistem ini dapat membuat BI bisa mengintip data transaksi keuangan masyarakat. Sistem ini menjadi bagian dari rencana pengembangan sistem pembayaran nasional melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Payment ID sendiri akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Dermawan.

"17 Agustus nanti akan keluar yang namanya Payment ID. Payment ID ini sangat powerful," ujar Budi.

Rencana kemunculan Payment ID pun membuat heboh. Di jagat maya X, banyak pihak yang mempertanyakan kemunculan Payment ID kaitannya dengan privasi keuangan hingga pajak, persoalan

"17 Agustus 2025. BI akan meluncurkan Payment ID. Hal ini sangat parah... Gak ada privasi data keuangan.. Mereka (Pemerintah) bisa melihat asset kita dmn," cuit akun @ba\*\*\*\*yu dilihat Minggu (10/8/2025).

"Pemerintah selalu selangkah kedepan tiap urusan penarikan pajak. Tapi urusan yang lain malah ribuan langkah dibelakang. Mending urusan pungli dulu tuh, biar sistem ekonomi dan investasi indo membaik," tulis akun @Le\*\*\*\*un.

Beberapa pihak juga ragu program Payment ID dapat berjalan dengan baik. Sebab, selama ini pemerintah dinilai gagap dalam urusan data dan digitalisasi pelayanan. Sistem

(Ilustrasi) Payment ID bakal diuji coba 17 Agustus mendatang sehingga BI bisa memantau transaksi belanja yang menggunakan tabungan di bank, kartu kredit, serta e-wallet.(dok)



Payment ID pun disebut-sebut bisa menimbulkan banyak masalah macam Core Tax yang diluncurkan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

"Jangan buru2 takut guys. inget ini Indonesia, bikin program beginian kayak yakin bener2 uda siap aja datanya bakal sinkron semua. selama kita ngurus apa2 masih dimintain copy ktp atau kk jangan berharap program beginian bisa jalan mulus. coretax yg kemarin2 aja zonk," tulis akun @ma\*\*\*of.

Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi juga mengamini masyarakat sebagai

konsumen di Indonesia memang mulai resah dengan instrumen Payment ID yang mau diluncurkan. Dia menilai dengan instrumen Payment ID ini, Bank Indonesia akan mengontrol atau mendeteksi seluruh lalu lintas transaksi dan pembayaran masyarakat, baik transaksi via perbankan, e-wallet, e-commerce, dan lain-lain.

"Dengan instrumen Payment ID ini, Bank Indonesia akan menelanjangi seluruh lalu lintas transaksi perbankan dan dompet digital, tersebut sebab semua transaksi itu akan terhubung dengan NIK masing-masing individu," kata Tulus Abadi dalam keterangannya.

## Diklaim Hanya Sasar Transaksi Bantuan Sosial

**PAYMENT ID** bakal diuji coba oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2025 mendatang. Ada sejumlah transaksi yang nantinya bisa dipantau Payment ID.

Transaksi yang bisa dipantau Payment ID mencakup pendapatan masyarakat sampai transaksi belanja yang menggunakan tabungan di bank, kartu kredit, serta e-wallet.

Sistem baru milik BI itu juga bisa melihat investasi hingga beban utang seseorang. Bahkan, transaksi pinjaman online (pinjol) juga tak lepas dari pantauan.

Kendati demikian, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono menegaskan uji coba pada 17 Agustus 2025 mendatang hanya menasar transaksi bantuan sosial. Ia mengklaim hadirnya Payment ID

bisa membantu akurasi penyaluran bansos.

Dicky juga menegaskan Payment ID sepenuhnya tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Terpisah, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Dermawan Saputra menjelaskan bahwa Payment ID akan menjadi tanda pengenalan unik (unique identifier). Sistem ini akan mencatat profil keuangan masyarakat dan diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kami (BI) akan melindungi pemilik Payment ID dan menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan," ucap Dudi dalam Editors Briefing 2025 di

Instrumen Payment ID juga dinilai berpotensi besar menabrak hak-hak warga negara, baik pada konteks pelanggaran rahasia perbankan, melanggar kenyamanan dan keamanan konsumen dalam bertransaksi, dan bahkan melanggar data pribadi nasabah.

"Dalam hal ini Bank Indonesia terlalu dalam memasuki ranah privat warga negara, dan oleh karena itu berpotensi melanggar hak asasi warga negara," lanjut Tulus. (wid,rls, ini,ant/dya)

### TENTANG PAYMENT ID

- **Identitas keuangan unik berbasis NIK**  
Payment ID adalah kode unik (9 karakter, kombinasi huruf dan angka) yang dihasilkan dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap individu mendapatkan satu ID yang berlaku
- **Manfaat:**  
Integrasi transaksi, bantu penyaluran bansos, efisiensi, penilaian kredit
- **Keamanan:**  
Hanya diakses dengan izin pemilik data (UU PDP)
- **Tahapan Peluncuran**  
Uji coba mulai 17 Agustus 2025, tepat di Hari Ulang Tahun ke-80 RI. Tahap awal fokus pada penyaluran bansos non-tunai, melibatkan pegawai BI dan penerima bantuan sosial.



Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (16/7/2025).

Dudi yakin sistem ini bisa mendeteksi dini tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan masyarakat.

Ia menegaskan Payment ID memang sangat powerful. Sistem ini bukan cuma melihat dari sisi pemasukan, tetapi juga pengeluaran. Apabila besar pasak daripada tiang, kondisi keuangan pemilik Payment ID bisa dicap tidak sehat.

Kendati demikian, Payment ID bukan untuk menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadirannya justru berperan sebagai pelengkap dalam memperkuat analisis sektor keuangan, khususnya dalam penyaluran kredit.(wid,rka,ktn/dya)

# ANGKA PERKAWINAN ANAK KABUPATEN MALANG MASUK 5 BESAR DI JATIM



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo. (dok. DP3A Kab Malang)

**MALANG** - Selama semester pertama 2025, tercatat sekitar 120 kasus pernikahan dini di Kabupaten Malang. Jumlah ini menempatkannya dalam 5 besar wilayah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur (Jatim).

"Kalau dari sisi angka absolut, Kabupaten Malang memang masih tinggi. Di tahun 2022 itu angkanya kita nomor dua se Jawa Timur, secara

absolut. Untuk tahun 2023 sampai di 2025 ini sementara kita masih di lima besar," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, dikutip pada Minggu (10/8/2025).

Arbani menjelaskan, tingginya angka absolut perkawinan anak di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar. Karena itu, meski masuk lima besar di Jawa Timur secara jumlah kasus, persentasenya tidak setinggi daerah lain jika dibandingkan dengan total penduduk.

"Kalau secara persentase sebenarnya kita tidak tinggi dengan membagi jumlah penduduk secara keseluruhan," jelas Arbani.

Arbani menambahkan, 120 kasus tersebut berasal dari rekomendasi

dispensasi kawin yang telah diputus Pengadilan Agama (PA) Malang hingga Juli 2025. Keputusan itu memberi izin menikah bagi pasangan yang salah satu pihaknya masih berusia anak.

Lebih lanjut, Arbani juga menyampaikan, faktor penyebab perkawinan anak di Kabupaten Malang meliputi beberapa aspek. Mulai dari ekonomi, mental, pergaulan, dan perilaku.

Dari sisi ekonomi, sebagian orang tua, menurutnya memilih menikahkan anak untuk mengurangi beban tanggung jawab, meski pasangan tersebut belum siap secara finansial.

Faktor mental juga menjadi penyebab, baik dari keinginan orang tua maupun anak itu sendiri. Dikatakan Arbani, perkembangan teknologi dan penggunaan smartphone mendorong sebagian anak merasa dewasa sebelum waktunya, padahal perkawinan membutuhkan kesiapan mental dan ekonomi.

Sementara dari sisi pergaulan, Arbani menyebut pengaruh negatif media sosial dan pergaulan bebas

dapat memicu kasus kehamilan sebelum menikah. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu pendorong terjadinya perkawinan anak.

"Selain itu, faktor budaya dan perilaku sebagian orang tua yang menikahkan anak setelah akil baligh juga memengaruhi angka perkawinan anak di Kabupaten Malang. Pandangan ini kan memang masih berkembang di tengah masyarakat kita," katanya.

Untuk menekan jumlah kasus, pihaknya menargetkan Kabupaten Malang dapat keluar dari lima besar dan berada di luar peringkat 10 di Jawa Timur. Upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi dampak negatif perkawinan anak. Yang dilakukan menasar kepada siswa, orang tua, dan masyarakat, serta melibatkan lintas perangkat daerah dan organisasi berbasis keagamaan.

"Target kami tidak muluk-muluk, paling tidak angka absolut ini bisa di peringkat 10 ke atas. Karena mengubah budaya dan mindset tidak bisa satu atau dua tahun, biasanya lebih dari lima tahun," pungkas Arbani. (Santi/Dya)

## Soal Pinjam Pakai Lahan UM untuk SMPN 4

# KETUA DPRD MINTA PEMKOT SIAPKAN OPSI RELOKASI MATANG-MATANG

**MALANG** - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, meminta Pemkot menyiapkan opsi relokasi SMP Negeri 4 secara matang. Di mana sekolah tersebut selama ini berdiri di atas lahan pinjam pakai milik Universitas Negeri Malang (UM).

Amithya menegaskan, meski keputusan relokasi belum diambil, skenario pemindahan harus dipikirkan sejak awal. Ia mengingatkan masa transisi tidak boleh mengorbankan kelancaran kegiatan belajar di sekolah.

"Kalaupun memang keputusannya adalah relokasi, pastinya jangan sampai anak-anak yang sedang berkegiatan di situ terganggu. Jadi masa transisi perpindahan harus smooth, proses belajar mengajar jangan sampai terganggu," ujarnya, Minggu (10/8/2025).

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang sempat menyampaikan opsi penggunaan gedung SD atau SMP yang kosong. Ataupun sekolah dengan jumlah murid sedikit, sebagai lokasi pengganti.

Namun, Kepala SMPN 4 menyebut

hal itu sulit direalisasikan mengingat jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah tersebut mencapai 27 kelas, sehingga membutuhkan kapasitas bangunan yang cukup besar.

Menanggapi hal itu, perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini menyatakan DPRD akan mencari solusi jika memang relokasi menjadi keputusan akhir. Salah satu opsi yang disebutkan adalah kemungkinan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atau hasil efisiensi anggaran.

"Sekarang tergantung kebutuhannya. Kalau ternyata ada kebutuhan mendesak untuk relokasi, itu harus menjadi prioritas. Tidak mungkin kami meninggalkan itu, pasti akan kami carikan solusinya. Perencanaannya harus matang dulu," jelasnya.

Dalam hal ini, Mia menekankan, apabila relokasi memang menjadi pilihan, penataan teknis dan kesiapan sarana prasarana (sarpras) harus tuntas sebelum keputusan diambil. Ia tidak ingin proses relokasi dilakukan tanpa kejelasan lokasi pengganti yang memadai.

"Apabila sudah diputuskan

relokasi, mestinya kebijakan dan penataan teknisnya sudah selesai. Jangan sampai sudah diputuskan relokasi, tetapi ternyata tidak siap sarprasnya," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan penggunaan lahan milik UM oleh SMPN 4 dan dua SD yang berada di lokasi sama, masih aman dalam waktu dekat ini. Wahyu mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Rektor UM dan jajarannya.

"Alhamdulillah tidak ada masalah. Sementara ini dari pihak UM belum memprioritaskan lahannya yang digunakan oleh dua SD dan SMPN 4 ini. Jadi masih tetap bisa digunakan," ujar Wahyu.

Meski demikian, Wahyu mengakui status UM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) memungkinkan kampus tersebut memanfaatkan asetnya untuk kepentingan operasional. Karena itu, Pemkot Malang



SMPN 4 Kota Malang. (smpn4.malang)

akan terus melakukan koordinasi sekaligus menyiapkan opsi jangka panjang.

Masa pinjam pakai lahan tersebut diketahui juga akan berakhir pada Februari 2026 mendatang. Wahyu menyatakan, ada kemungkinan masa pinjam pakai diperpanjang sambil menyiapkan alternatif lain.

"Nanti akan kami evaluasi, kemungkinan akan kita perpanjang penggunaannya. Termasuk upaya-upaya lain juga akan dilakukan," pungkasnya. (Santi/Dya)



Petugas polisi menahan seorang demonstran dalam demonstrasi yang diselenggarakan oleh Defend Our Juries, yang menentang larangan pemerintah Inggris atas "Aksi Palestina" berdasarkan undang-undang antiterorisme, di Parliament Square, London, Inggris, Sabtu (9/8/2025). (Foto: Reuters)

# 466 PENDEMO PRO-PALESTINA DITAHAN POLISI INGGRIS

Polisi Inggris menahan 466 orang dalam aksi protes terbaru di London karena menunjukkan dukungan terhadap kelompok Palestine Action. Dukungan itu diberikan meski pemerintah Inggris telah melarang kelompok tersebut bulan lalu melalui undang-undang antiterorisme.---

**D**ikutip dari AFP, Minggu (10/8/2025), Kepolisian Metropolitan mengonfirmasi penangkapan tersebut, yang diperkirakan menjadi salah satu jumlah terbesar dalam sejarah aksi protes di ibu kota Inggris. Penangkapan dilakukan karena para peserta dianggap "mendukung organisasi terlarang."

Kepolisian juga menangkap delapan orang atas pelanggaran lain termasuk lima orang atas dugaan penyerangan terhadap petugas, meskipun tidak ada yang mengalami luka serius.

Pemerintah melarang Palestine Action pada awal Juli, beberapa hari setelah mereka mengaku bertanggung jawab atas pembobolan pangkalan angkatan udara di Inggris selatan yang menyebabkan kerugian sekitar £7 juta pada dua pesawat.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa para aktivisnya menanggapi dukungan militer tidak langsung Inggris untuk Israel di tengah perang di Gaza.

Kementerian Dalam Negeri Inggris menegaskan kembali menjelang protes hari Sabtu bahwa Palestine Action juga dicurigai melakukan "serangan serius" lainnya yang melibatkan "kekerasan, cedera serius, dan kerusakan kriminal yang luas".

Namun, para kritikus, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok seperti Amnesty International dan Greenpeace, telah mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum dan ancaman terhadap kebebasan berbicara.

Para pengunjung rasa, beberapa mengenakan syal Palestina hitam-putih dan mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan "Jangan sentuh Gaza", dan membawa plakat bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Aksi Palestina", sebagaimana ditunjukkan dalam video yang diambil Reuters di lokasi kejadian.

Israel telah menghadapi tuduhan

genosida di Mahkamah Internasional dan dari kelompok hak asasi manusia atas serangan militernya yang

menghancurkan di Gaza.

Israel membantah tuduhan tersebut dan menganggap serangannya sebagai pembelaan diri setelah serangan mematikan pada Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina.

Diketahui salah satu pendiri kelompok tersebut, Huda Ammori, minggu lalu memenangkan upaya untuk mengajukan gugatan hukum terhadap larangan tersebut. (AFP, Reuters, ist/nei)

## • RENCANA ISRAEL KUASAI GAZA •

Aspek	Rincian
1. Pengumuman Resmi	Israel setuju rencana kuasai Gaza City.
2. Strategi Operasional	Evakuasi 1 juta warga, lalu serang Hamas.
3. Tujuan Resmi Israel	Bongkar Hamas, bebas sandera, bentuk pemerintahan baru.
4. Pendapat Militer & Pakar	Peringatan risiko sandera dan perang panjang.
5. Respons Publik & Internasional	Protes besar, kecaman internasional.
6. Konteks Kemanusiaan	61.000 tewas, krisis kemanusiaan memburuk.

## Israel Mau Caplok Gaza, Massa Protes di Tel Aviv

**RIBUAN** warga memadati jalan-jalan Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025) waktu setempat untuk menuntut diakhirinya perang di Gaza. Protes tersebut berlangsung setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana memperluas operasi militer dan mengambil alih Kota Gaza.

Dikutip dari AFP pada Minggu (10/8/2025), para demonstran membawa spanduk dan foto para sandera yang masih ditahan di wilayah Palestina. Mereka menuntut pemerintah Israel menjamin pembebasan para sandera.

"Kami akan mengakhiri dengan pesan langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: jika Anda menyerbu sebagian wilayah Gaza dan para sandera dibunuh, kami akan mengejar Anda di alun-alun kota, dalam kampanye pemilu, dan di setiap waktu dan tempat," ujar Shahar Mor Zahiro, kerabat seorang sandera yang terbunuh, kepada AFP.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan melancarkan operasi untuk merebut Kota Gaza.

"Kami tidak ingin memperindahkannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," kata Netanyahu saat diwawancarai Fox News, dikutip Reuters, Kamis (8/8/2025).

Meski menuai kritik dan memicu rumor adanya perbedaan pendapat di kalangan petinggi militer Israel, Netanyahu tetap teguh dengan rencana tersebut.

Namun, sebagian besar sandera yang telah dibebaskan sejauh ini merupakan hasil negosiasi diplomatik. Perundingan menuju gencatan senjata yang seharusnya dapat membebaskan lebih banyak sandera gagal pada bulan Juli.

"Mereka (pemerintah) fanatik. Mereka melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan negara," kata Rami Dar, pensiunan berusia 69 tahun, yang datang dari pinggiran kota terdekat di luar Tel Aviv, menyuarakan seruan agar Trump memaksakan kesepakatan bagi para

sandera.

Tel Aviv telah menyaksikan demonstrasi yang sering mendesak pemerintah untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan dengan Hamas, yang memicu perang dengan serangan mereka pada Oktober 2023. Demonstrasi hari Sabtu menarik lebih dari 100.000 pengunjung rasa, menurut penyelenggara.

"Sejujurnya, saya bukan ahli atau semacamnya, tapi saya merasa setelah dua tahun bertempur, belum ada hasil," kata Yana, 45 tahun, yang menghadiri demonstrasi bersama suami dan dua anaknya. "Saya bertanya-tanya apakah tambahan nyawa bagi kedua belah pihak, bukan hanya warga Israel tetapi juga warga Gaza, akan berpengaruh."

Sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga Israel, tewas dan 251 orang dibawa ke Gaza selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 400 tentara Israel telah tewas di Gaza sejak saat itu. (Reuters, Fox News, AFP, ist/nei)

# Mengenal 'Performative Male' Gaya Baru Pria Gen Z

**F**enomena "performative male" atau pria performatif sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan telah berkembang menjadi tren global, termasuk di Indonesia. Istilah ini merujuk pada gaya atau citra diri yang dibangun oleh sebagian pria, terutama dari Generasi Z, sebagai respons terhadap dinamika sosial yang kian berkembang. Mereka menciptakan persona yang dianggap "progresif" dan "sensitif" untuk mendapatkan daya tarik di mata perempuan dan lingkungan sosial.

Buktinya, tren ini tidak hanya terbatas di dunia maya. Sebuah kontes "performative male" bahkan pernah diadakan di Jakarta, yang dokumentasinya diunggah oleh akun media sosial @ussfeeds. Ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut telah bergeser dari sekadar wacana digital menjadi bagian dari budaya pop di kehidupan nyata.

Kontes tersebut seolah menjadi panggung bagi para pria untuk menampilkan atribut-atribut yang mencerminkan citra ideal ini, seperti membawa buku feminis, gitar akustik, atau kamera analog—semua demi citra diri yang unik dan menarik secara visual.

## Apa itu Pria Performatif?

Menurut media massa Stuff, pria performatif adalah sosok yang menampilkan citra progresif, terlihat lembut, dan sadar secara emosional, namun semua itu hanya di permukaan. Mereka mungkin fasih berbicara tentang isu kesehatan mental, membaca buku-buku feminis, atau mendengarkan musisi indie yang sedang naik daun.

## Persona Tampilan

Mereka membangun citra yang secara stereotip dianggap berlawanan dengan maskulinitas tradisional. Atribut yang sering digunakan mencakup tote bag, minum matcha, rajin menjalani terapi, hingga memahami astrologi atau zodiak.

Tampilan ini seolah-olah menunjukkan bahwa mereka adalah pria yang peka, artistik, dan berpikiran terbuka.

Namun, inti permasalahannya adalah motivasi di balik semua tindakan ini. Perilaku tersebut sering kali tidak didasari oleh pertumbuhan pribadi yang autentik, melainkan didorong oleh keinginan untuk terlihat menarik dan diterima oleh perempuan modern. Berikut adalah ciri-ciri pria performatif:

## Konten di Media Sosial

Citra ini dikemas secara apik dan estetik di platform seperti TikTok dan Instagram. Konten mereka sering kali berfokus pada "healing", "self-love", dan "self-care" dengan narasi yang sarat akan kesadaran emosional.

## Motivasi di Balik Tindakan

Hal yang membedakan mereka dari pria yang benar-benar peduli adalah motivasinya. Citra ini dibangun bukan karena ketertarikan pribadi yang tulus, melainkan demi validasi dan daya tarik dari lingkungan sosial. Mereka tahu betul citra ini disukai, dan mereka memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi.

## Menurut Psikologis

Fenomena ini sejatinya memiliki sisi positif karena secara tidak langsung menantang pola pikir maskulinitas yang kaku dan kolot. Namun, masalah muncul ketika fokus mereka hanya pada tampilan luar. Mereka lebih mementingkan estetika dan kesan yang ditimbulkan, alih-alih meresapi dan benar-benar memahami pemikiran yang mendalam di balik isu-isu yang mereka suarakan.

Di balik kesan lembut dan terbuka, ada dorongan kuat akan validasi, status, dan kontrol. Mereka menggunakan persona ini sebagai alat untuk memanipulasi persepsi orang lain. Pria performatif mungkin mahir menarik perhatian karena citra mereka yang lembut dan berpikiran terbuka, tetapi mereka kesulitan membangun koneksi emosional yang nyata. Mereka bisa saja berbicara tentang luka batin dan trauma, tetapi menghindar saat diminta untuk bertanggung jawab atau terlibat dalam percakapan yang lebih

serius. Ketika dikritik, mereka cenderung menempatkan diri sebagai korban, bukan pelaku.

## Kajian Gender dan Evolusi Sejarah

Fenomena "performative male" bukan sekadar tren tanpa dasar; ia dapat dianalisis melalui lensa kajian gender. Teori "doing gender" oleh Candace West dan Don Zimmerman (1987), serta gagasan performativitas gender dari Judith Butler, menjelaskan bahwa gender, termasuk maskulinitas, bukanlah bawaan biologis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dibentuk melalui tindakan berulang yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

## Era 1970-an

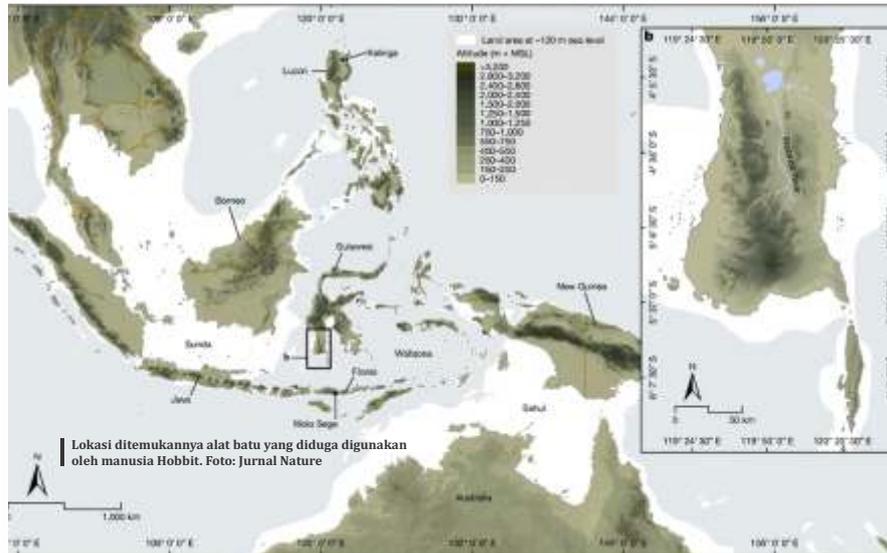
Di tengah gelombang feminisme kedua, banyak pria yang mengukuhkan sebagai pendukung gerakan perempuan. Namun, motif di balik dukungan itu sering kali adalah untuk mendekati perempuan atau menghindari kritik sosial. Mereka mungkin tampak pro-feminis tetapi masih melakukan mansplaining atau menghindari tanggung jawab emosional.

## Era 1990-an

Budaya pop memperkenalkan sosok "pria bohemian" atau "sad boy" melalui karakter-karakter film seperti Reality Bites dan High Fidelity. Mereka tampil sebagai sosok yang emosional dan mendalam, namun sering kali memiliki sisi manipulatif. Saat ini, estetika tersebut telah berevolusi mengikuti zaman. Jika di masa lalu atributnya adalah puisi dan musik eksperimental, kini digantikan oleh atribut modern seperti matcha, (nei,ist/dya)



# TEMUAN BARU UNGKAP HOBBIT DIDUGA BERASAL DARI SULAWESI



Lokasi ditemukannya alat batu yang diduga digunakan oleh manusia Hobbit. Foto: Jurnal Nature

**S**elama ini, Pulau Flores dikenal sebagai tempat tinggal manusia purba bertubuh kecil yang

dijuluki Hobbit. Namun, penemuan terbaru justru mengalihkan fokus para peneliti ke Sulawesi, yang ternyata menyimpan jejak migrasi awal manusia purba yang usianya lebih tua dari yang selama ini diperkirakan.

Sebuah penelitian terbaru mengungkap, manusia purba telah menetap di Sulawesi sejak 1,5 juta tahun lalu. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa para Hobbit yang hidup di Flores dulunya datang dari pulau didekatnya, bukan langsung dari daratan Asia Tenggara.

Sudah lama para ilmuwan menduga manusia purba dari era Pleistosen berlayar menyeberangi wilayah kepulauan Wallacea, zona geografis unik yang memisahkan Asia dan Australia. Artefak di Pulau Flores, misalnya, telah berusia 1,02 juta tahun.

Fosil Homo floresiensis yang merupakan manusia Hobbit Flores juga ditemukan di pulau itu,



Tengkorak manusia hobbit Flores dengan rahang bawah (Homo floresiensis). Foto: Victor1153/Shutterstock

sedangkan spesies mungil serupa, Homo luzonensis, ditemukan di Pulau Luzon, Filipina.

Namun kini, tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Adam Brumm dari Griffith University, bersama koleganya Budianto Hakim, berhasil menggali lebih dalam sejarah awal manusia di Sulawesi. Mereka menghabiskan puluhan tahun mencari bukti kehadiran manusia di Sulawesi sebelum mereka tiba di Flores. Hasilnya? Mengejutkan.

Segalanya berubah ketika tim menemukan tujuh alat batu dari batu chert di sebuah ladang jagung di Sulawesi Selatan. Diterbitkan di jurnal Nature, berdasarkan analisis sedimen dan fosil rahang bayi yang ditemukan bersama alat tersebut, usia alat batu ini diperkirakan antara 1,04 hingga 1,48 juta tahun.

Menariknya, usia ini lebih tua dari artefak tertua yang pernah ditemukan di Flores. Artinya, besar kemungkinan manusia purba terlebih dahulu singgah di Sulawesi sebelum melanjutkan ke Flores, yang letaknya ratusan kilometer di selatan.

“Saya rasa ini satu keping teka-teki yang membuat teori bahwa Sulawesi adalah titik awal migrasi ke Flores jadi lebih masuk akal,” kata Brumm sebagaimana dikutip IFL Science.

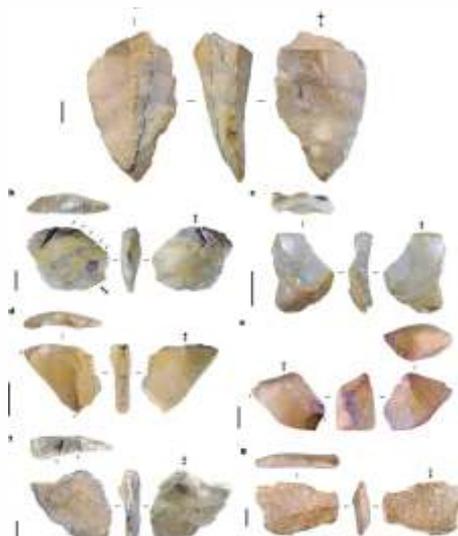
Namun, ia menekankan bahwa tanpa adanya fosil manusia purba langsung dari Sulawesi, belum bisa dipastikan siapa sebenarnya pembuat alat-alat tersebut.

Hipotesis utama saat ini menyebut Homo floresiensis merupakan keturunan Homo erectus yang mengalami pengecilan tubuh akibat hidup terisolasi di pulau, fenomena yang dikenal sebagai island dwarfism. Apakah populasi awal Sulawesi juga berasal dari Homo erectus? Apakah mereka juga mengalami evolusi serupa? Sayangnya, belum ada fosil manusia yang ditemukan untuk menjawab pertanyaan itu.

Misteri lain yang mencuat adalah, bagaimana manusia purba bisa sampai ke Sulawesi?

Brumm meragukan bahwa mereka memiliki kemampuan kognitif untuk membuat perahu atau merencanakan perjalanan laut yang kompleks. Ia justru menduga bahwa perjalanan melintasi laut pertama manusia bisa jadi terjadi secara tidak sengaja, mirip dengan cara tikus atau monyet tersebar secara alami.

Meski penemuan ini membantu mengisi celah dalam narasi migrasi manusia di Asia Tenggara, banyak misteri yang masih tersisa. “Siapa sebenarnya mereka? Apa yang terjadi setelah mereka tiba di Sulawesi? Dan bagaimana ketika spesies kita manusia modern pertama kali menginjakkan kaki di Sulawesi sekitar 65.000 tahun lalu?” ujar Brumm. (nei,ist/dya)



Alat batu yang diduga digunakan manusia Hobbit. Foto: Jurnal Nature



HARIAN **LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
www.lenteratoday.com  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**MEDIA TERVERIFIKASI**

**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Wabah Chikungunya Meluas Kenali Gejala hingga Pencegahannya

**K**asus infeksi virus chikungunya dilaporkan meningkat tajam di China dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini mendorong otoritas kesehatan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat aturan perjalanan menuju dan dari China.

Meski virus ini pertama kali diidentifikasi sejak 1950-an, kasusnya kini semakin sering terjadi. CDC tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peringatan perjalanan ke China menyusul wabah chikungunya yang terjadi di Provinsi Guangdong. Begitu pun Indonesia, sejauh ini belum ada aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes dalam menanggapi masalah ini.

Dikutip dari South China Morning Post pada Jumat (8/8/2025) di Kota Foshan, Tiongkok, terjadi lonjakan kasus chikungunya yang signifikan, melebihi 5.000 kasus. Akibatnya, status darurat kesehatan di wilayah tersebut dinaikkan menjadi level III. Meskipun mayoritas kasus ringan, jumlahnya yang besar menimbulkan kekhawatiran global.

Sebuah penelitian memprediksi bahwa, karena perubahan iklim, wilayah risiko tinggi chikungunya bisa meluas ke utara, berpotensi mempengaruhi provinsi lain di luar Guangdong. Hingga saat ini, Tiongkok belum masuk dalam daftar negara berisiko tinggi versi CDC, tetapi situasinya terus dipantau.

## Apa itu Chikungunya?

Chikungunya adalah penyakit virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes albopictus*, spesies yang juga menyebarkan demam berdarah dan Zika. Setelah terinfeksi, penderita memiliki kadar virus tinggi dalam darah, memungkinkan nyamuk lain yang menggigitnya ikut menularkan.

Penularan juga bisa terjadi melalui transfusi darah atau kontak di laboratorium. Meskipun sangat jarang, virus dapat menular dari ibu ke janin selama kehamilan atau

persalinan, namun tidak ada bukti penularan melalui ASI.

## Gejala dan Komplikasi

Tidak semua orang yang terinfeksi menunjukkan gejala, namun jika muncul, biasanya terjadi 4-8 hari setelah gigitan. Gejala utamanya adalah demam tinggi mendadak dan nyeri sendi parah, yang bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Istilah "chikungunya" sendiri berasal dari bahasa Kimakonde yang berarti "berjalan membungkuk," menggambarkan posisi penderita akibat nyeri sendi.

Gejala lain yang umum adalah nyeri otot, sakit kepala, dan kelelahan. Karena gejalanya mirip dengan demam berdarah, diagnosis bisa sulit. Meskipun kebanyakan penderita sembuh total, komplikasi serius seperti kerusakan organ, ensefalitis, atau bahkan kematian tetap bisa terjadi.

## Penyebab Chikungunya

Chikungunya disebabkan oleh virus Chikungunya yang dibawa oleh nyamuk *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Kedua nyamuk tersebut adalah jenis nyamuk yang juga menularkan penyakit demam berdarah dan virus Zika. Umumnya, nyamuk ini menggigit di siang dan malam hari.

Nyamuk *Aedes* mendapatkan virus Chikungunya saat menggigit seseorang yang telah

terinfeksi sebelumnya. Penularan terjadi bila orang lain digigit oleh nyamuk pembawa virus chikungunya. Meski demikian, virus chikungunya hanya menular melalui nyamuk dan tidak menyebar secara langsung antarmanusia.

Chikungunya dapat menyerang siapa saja. Namun, risiko terserang penyakit ini lebih tinggi pada bayi baru lahir, orang usia 65 tahun ke atas, dan orang dengan kondisi medis lain, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

## Pengobatan Chikungunya

Dalam banyak kasus, gejala chikungunya akan mereda dalam 1-2 minggu. Meski demikian, nyeri sendi dapat berlangsung hingga hitungan bulan atau bahkan tahun.

Pengobatan untuk chikungunya berfokus pada peredaan gejala, terutama demam dan nyeri sendi, karena penyakit ini umumnya akan sembuh dengan sendirinya dalam satu hingga dua minggu. Untuk itu, dokter dapat meresepkan obat antiperadangan seperti Paracetamol (Panadol), Ibuprofen (Proris), atau Naproxen (Xenifar) untuk membantu pasien mengatasi keluhan tersebut.

Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan ini, terutama karena beberapa obat dapat berisiko menyebabkan perdarahan jika gejala yang dialami ternyata adalah demam berdarah.

Sebelum mengonsumsi obat-obatan tersebut,

pastikan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika Anda sedang menjalani pengobatan untuk kondisi lain. Jangan mengonsumsi aspirin atau obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS) sebelum dokter memastikan gejala yang dialami bukan gejala demam berdarah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah risiko perdarahan.

Di samping mengonsumsi obat, pasien juga disarankan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup.

## Pencegahan Chikungunya

Pencegahan chikungunya berfokus pada penurunan risiko gigitan nyamuk, terutama melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan menerapkan gerakan 3M Plus. Tiga langkah utama ini terdiri dari menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, dan mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air.

Selain melakukan 3M, ada juga langkah-langkah tambahan yang bisa diterapkan untuk mencegah gigitan nyamuk. Tindakan ini, yang dikenal sebagai "Plus", meliputi menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik, menggunakan obat anti-nyamuk, memasang kawat anti-nyamuk di jendela, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka.

Selain itu, memperbaiki saluran air yang tersumbat dan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar juga sangat efektif dalam menekan populasi nyamuk.

Ketika bepergian ke daerah endemik chikungunya, langkah-langkah pencegahan tambahan sangat disarankan untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk. Penting untuk menggunakan losion anti-nyamuk secara rutin, terutama yang mengandung N, N-diethyl-3-methylbenzamide (DEET). (nei,ist/dya)



**Efisiensi Anggaran, (dari Hal 1) ...**

**P**asal 2 ayat (2) PMK nomor 56 tahun 2025 ini menegaskan efisiensi di 2026 bukan cuma menghemat anggaran K/L, tetapi juga efisiensi dana transfer ke daerah (TKD). "Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Pasal 2 ayat (3).

Sumber efisiensi anggaran diutamakan yang berasal dari rupiah murni. Bila kebutuhan efisiensi belum terpenuhi dari rupiah murni, maka efisiensi bisa dilakukan terhadap anggaran yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping, PNBP badan layanan umum (BLU), dan surat berharga syariah negara (SBSN).

PMK 56/2025 menegaskan bahwa penyesuaian jenis belanja harus dengan tetap memastikan anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, dan pelayanan publik tetap terpenuhi, dikutip antara, Sabtu (9/8/2025).

Selain itu, penyesuaian efisiensi belanja juga diminta untuk menghindari pengurangan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN), kecuali karena berakhirnya kontrak atau hasil evaluasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Sedangkan untuk TKD, Pasal 17 PMK 5/2025 menyebutkan efisiensi dilakukan terhadap infrastruktur atau yang diperkirakan untuk infrastruktur, pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah, transfer yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah, transfer yang tidak digunakan untuk layanan pendidikan dan kesehatan, serta transfer lain yang ditentukan.

TKD yang menjadi anggaran efisiensi dilakukan pencadangan dan tidak disalurkan ke daerah, kecuali ada arahan dari presiden. Rincian alokasi TKD dilakukan per provinsi/kabupaten/kota dan/atau per bidang oleh menteri keuangan.

Sehingga, tidak ada perbedaan mencolok pada aturan baru tata cara efisiensi anggaran di 2026. Poin-poin yang dihemat masih sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yakni beleid yang mengatur efisiensi anggaran tahun ini.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemangkasan pos belanja seperti alat tulis kantor, rapat, perjalanan dinas, hingga honor kegiatan bertujuan menciptakan ruang fiskal bagi program prioritas. Ruang tersebut akan dialihkan ke

program berbasis kesejahteraan dan ketahanan pangan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki efek pengganda tinggi.

Menurut Josua, efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi penajaman kualitas belanja agar lebih fokus pada capital spending. Selain itu, langkah ini menjadi instrumen tata kelola kas untuk menghindari pemborosan akhir tahun dan menjaga defisit APBN di kisaran 2,6-2,8% PDB.

Kebijakan efisiensi juga memberi bantalan terhadap risiko eksternal seperti tarif timbal balik AS dan pelemahan permintaan global. Meski konsumsi pemerintah masih berkontraksi, belanja modal tumbuh 30,3% (yoy) pada kuartal II 2025. Dengan realisasi belanja negara baru 40%, ruang akselerasi semester II masih terbuka lebar.

Josua menekankan, pemangkasan pos belanja dengan efek multiplier rendah minim dampak terhadap PDB, sementara alokasi ke MBG dapat mendorong permintaan pangan lokal, distribusi, dan jasa logistik.

Josua mengatakan tercatat 15 pos belanja menjadi target efisiensi, mulai dari ATK, kegiatan seremonial; seminar; pelatihan; hingga, perjalanan dinas dan infrastruktur. Kemudian ada juga rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; serta percetakan dan souvenir. Lalu, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan; lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; dan infrastruktur.

"Tanpa eksekusi yang tepat, efisiensi hanya akan menjadi catatan di atas kertas tanpa dorongan nyata bagi pertumbuhan," kata Josua Sabtu (9/8/2025).

Sementara itu, tata cara efisiensi dana TKD diatur pada Bab IV PMK Nomor 56 Tahun 2025. Belum ada nilai efisiensi. Hanya dirinci 5 sektor TKD yang harus dihemat pada 2026. Pertama, untuk infrastruktur dan/atau TKD yang diperkirakan untuk infrastruktur. Kedua, TKD yang diberikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan suatu daerah.

Kemudian, ketiga, TKD yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah dalam peraturan perundang-undangan mengenai APBN tahun anggaran berkenaan. Keempat, TKD yang tidak digunakan untuk mendanai pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Kelima, TKD lainnya yang ditentukan.

"Terhadap TKD hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pencadangan dan tidak disalurkan ke daerah," bunyi Pasal 17

ayat (4). Dana TKD yang dihemat itu masih bisa disalurkan ke daerah nantinya. Asalkan, ada arahan dari Prabowo.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurrahman, mengatakan efisiensi anggaran negara pada prinsipnya merupakan tindakan yang bisa saja dilakukan dalam kerangka menjaga disiplin fiskal. Apalagi di tengah tekanan pembiayaan APBN akibat pelemahan pendapatan, peningkatan beban bunga utang, dan kebutuhan untuk menjaga defisit tetap terkendali.

Namun, kondisi makroekonomi saat ini menunjukkan adanya perlambatan konsumsi rumah tangga, stagnasi investasi swasta, dan meningkatnya tekanan sosial akibat PHK dan daya beli yang melemah. "Dalam konteks tersebut, efisiensi anggaran bisa kontraproduktif bila diterapkan secara across-the-board (secara menyeluruh) tanpa mempertimbangkan fungsi stimulatif belanja negara terhadap perekonomian," katanya dilansir CNNIndonesia.

Rizal mengatakan efisiensi anggaran menjadi kurang tepat waktu (ill-timed) apabila tidak dibarengi dengan reformasi alokasi anggaran yang bersifat produktif. Pasalnya belanja pemerintah masih menjadi penopang utama PDB di mana kontribusi pengeluaran pemerintah (government spending) ke pertumbuhan ekonomi masih signifikan.

Jika efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja modal atau belanja sosial produktif, ia justru khawatir kebijakan itu akan menghambat pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagnasi ekonomi (growth trap).

Rizal mengatakan dampak efisiensi anggaran terhadap ekonomi masyarakat sangat bergantung pada pos-pos belanja yang dikurangi. "Bila efisiensi menyasar belanja birokrasi seperti perjalanan dinas, honorarium, pengadaan barang non-esensial, atau anggaran seremonial, maka pengaruhnya terhadap masyarakat relatif kecil. Namun jika penghematan merambah belanja perlindungan sosial, subsidi pangan dan energi, atau transfer ke daerah seperti Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus, maka akan terjadi tekanan serius pada daya beli masyarakat dan kualitas pelayanan publik," katanya.

Dia menandakan bahwa dampaknya akan semakin terasa terlebih di daerah-daerah yang sangat bergantung pada TKD untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dalam jangka pendek, pemangkasan ini bisa menekan konsumsi masyarakat, terutama kelompok rentan. Akibatnya, aktivitas ekonomi lokal bisa

melambat.

"Dalam jangka panjang, efisiensi yang tidak terarah berisiko mengganggu pembangunan SDM dan memperlebar kesenjangan antardaerah," katanya.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan pos anggaran yang layak untuk dihemat adalah belanja negara yang memiliki dampak ekonomi rendah, boros, atau bersifat administratif semata. Misalnya belanja operasional birokrasi seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, pengadaan barang yang tidak mendesak, serta subsidi yang tidak tepat sasaran. Penghematan di sektor itu katanya tidak hanya efisien, tetapi juga dapat dialihkan untuk mendanai program yang lebih produktif dan berkeadilan.

Sebaliknya, lanjutnya, pos yang tidak boleh dipangkas adalah belanja yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar dan berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat serta pembangunan jangka panjang. Misalnya belanja perlindungan sosial, bantuan pangan, dana pendidikan dan kesehatan, dan transfer ke daerah untuk infrastruktur dan pelayanan dasar.

"Pemangkasan di pos-pos strategis ini hanya akan memperlemah pondasi ekonomi nasional dan memperburuk ketahanan sosial, terutama bagi kelompok miskin dan rentan," kata Rizal.

Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan efisiensi anggaran adalah kebijakan yang tidak bisa ditolak dari sudut pandang teknokratis. Pasalnya pemerintah harus bertanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara, terutama dalam menghadapi tekanan defisit, volatilitas global, dan kewajiban utang jangka panjang.

Namun, efisiensi tak bisa hanya dipahami sebagai pemotongan belanja semata, tanpa disertai desain realokasi yang berbasis produktivitas.

"Belanja efisien seharusnya diukur berdasarkan dampaknya terhadap pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan, bukan semata-mata pada nominal penghematan," katanya.

Syafruddin mengatakan efisiensi tidak akan bermakna bila tidak mendukung strategi pertumbuhan nasional. Efisiensi anggaran katanya tetap penting sebagai strategi menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi bukanlah jalan pintas untuk penghematan, melainkan strategi jangka menengah untuk mengalihkan sumber daya ke sektor yang menciptakan nilai tambah tinggi. (han,ant,ist/lut)



BPOM memberikan keterangan pada media terkait temuan pencabutan izin edar 21 produk Kosmetik, Sabtu (9/8/2025).

# BPOM MENCABUT IZIN EDAR 21 PRODUK KOSMETIK

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut izin edar 21 produk kosmetik yang mengandung komposisi tidak sesuai dengan data yang didaftarkan maupun informasi pada kemasan.

**K**epala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengatakan langkah ini diambil setelah pengawasan intensif terhadap sarana produksi kosmetik, termasuk memantau isu yang beredar di masyarakat.

"Belakangan ini merebak kosmetik beredar dengan komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Untuk itu, kami lakukan intensifikasi pengawasan untuk menindaklanjutinya," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (9/8/2025).

Dalam pengawasan tersebut, BPOM menemukan perbedaan jenis bahan, kadar bahan, atau keduanya pada beberapa produk, dengan sebagian besar pelanggaran tercatat dalam kosmetik yang diproduksi melalui kontrak manufaktur. Ketidaksihinggaan ini dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti reaksi alergi pada pengguna yang sensitif terhadap bahan yang tidak disebutkan. Selain itu, manfaat produk mungkin tidak sesuai dengan klaim pada kemasan.

• • Produksi atau distribusi kosmetik yang tidak memenuhi data melanggar Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. BPOM telah mencabut izin edar dari 21 produk tersebut dan memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dan memusnahkan produk terkait.

"BPOM telah menindak tegas temuan kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang ini. BPOM telah mencabut izin edar serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), yang meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi," tegas Taruna Ikrar.

Salah satu produk yang diduga dikaitkan dengan 'dokter vocal' adalah AMIRADERM Glowing Night Cream Series dengan nomor izin edar atau notifikasi NA18210101701. Pasalnya dari beberapa produk skincare yang ditarik oleh BPOM melalui rilis resminya terdapat nama AMIRADERM Glowing Night Cream Series - NA18210101701. Dari penelusuran halaman akun Instagram @amiraderm, tertera keterangan nama 'Amiraderm by dr Amira Dipl AAAM'.

Di satu sisi, bersangkutan dikenal vocal dalam mengkritisi kosmetik abal-abal yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, izin edar untuk produk skincare tersebut baru resmi diterbitkan oleh BPOM pada tanggal 4 Maret 2025. Namun, penelusuran berbagai sumber menunjukkan bahwa penjualan produk telah dimulai sejak bulan November 2024, sekitar empat bulan sebelum izin resmi keluar.

Praktik ini jelas bertentangan dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengawasan Peredaran Kosmetik, yang mewajibkan setiap produk kosmetik atau skincare memiliki izin edar sebelum dipasarkan atau dikonsumsi masyarakat.

Dia mengatakan in merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan peredaran kosmetik di Indonesia. Produk yang belum memiliki izin tidak terjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya. Produk yang diinformasikan dan dijual secara luas melalui media sosial dan e-commerce. Beberapa konsumen bahkan telah membeli produk tersebut pada akhir tahun 2024.

Kasus ini pun mendapat perhatian dari komunitas medis dan publik, mengingat posisi Dr. A sebagai figur publik sekaligus tenaga kesehatan yang seharusnya memahami regulasi dan etika profesional.

Sementara itu Manager dokter detektif atau dr Amira Farahnaz, Dipl. AAAM, Taufik Ardi kemudian membagikan klarifikasi resmi dari pihak Amiraderm. Pihaknya mengklaim produk tersebut sudah

mengantongi izin edar dengan nomor notifikasi berbeda yang bisa dicek di laman resmi BPOM RI.

"Menanggapi beredarnya informasi tentang produk kami yang disebut tidak memiliki izin edar, Amiraderm Glowing Night Cream Series telah terdaftar di BPOM dengan nomor registrasi NA18250103420," tegasnya, Kamis (7/8/2025) lalu.

Namun Amiraderm tidak menjelaskan soal komposisi bahan yang ditemukan BPOM RI 'overclaim' dalam notifikasi berbeda.

BPOM juga mengingatkan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Guidelines for Good Cosmetic Manufacturing Practices (CPKB), dan memastikan setiap batch diproduksi sesuai formula yang disetujui dalam notifikasi.

Masyarakat juga diimbau untuk memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa pada CekKLIK serta melaporkan produk yang dicurigai cacat melalui Pusat Kontak HALOBPOM (1500533) atau kantor BPOM setempat.

Kepada masyarakat, BPOM mengimbau untuk cermat memilih kosmetik dan tidak mudah percaya pada klaim yang menyesatkan. Masyarakat diminta melakukan pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa (CekKLIK), serta melaporkan produk yang dicurigai melanggar ketentuan melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau Balai POM setempat.

**Bahaya Kosmetik Abal Abal**  
Kosmetik abal-abal maupun yang tidak mengantongi izin dari BPOM

sebagai regulator pemerintah dinilai berbahaya. Dari hasil sampling dan pengujian dan beberapa jurnal menyatakan, seluruh temuan tersebut positif mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Bahan dilarang dan/atau berbahaya yang ditemukan, yaitu merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, pewarna kuning metanil, dan steroid.

Bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat kandungan bahan berbahaya dan/atau dilarang dalam kosmetik sangat bervariasi, mulai dari efek ringan hingga berat. Merkuri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, bahkan kerusakan ginjal. Asam retinoate

dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin bagi wanita hamil (bersifat teratogenik). (han,ist/lut)



**BPOM telah menindak tegas temuan kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang ini. BPOM telah mencabut izin edar serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), yang meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi,"**

**TARUNA IKRAR**  
Kepala BPOM RI

## DAFTAR 21 PRODUK KOSMETIK YANG DICABUT IZINNYA OLEH BPOM :

- ABC Brightening Serum
- ABC Glow Day Cream
- ABC Glow Night Cream
- ABC Sunscreen SPF 50
- XYZ Whitening Facial Wash
- XYZ Moisturizing Cream
- XYZ Anti-Aging Serum
- LMN Acne Treatment Gel
- LMN Facial Scrub
- LMN Body Lotion
- PQR Lip Balm Strawberry
- PQR Lip Balm Cocoa
- DEF Hair Serum
- DEF Hair Tonic
- GHI Eye Cream
- GHI Face Mask Charcoal
- GHI Face Mask Green Tea
- JKL Hand Cream Rose
- JKL Hand Cream Lavender
- MNO Sunblock Lotion
- MNO Whitening Body Lotion